

Jokowi Bakal Membentuk Dewan Penasihat Otorita IKN

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken peraturan presiden (Perpres) nomor 62 tahun 2022 mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam Perpres yang ditandatangani pada 18 April lalu, diatur adanya pembentukan Dewan Penasihat Otorita IKN.

"Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara," dikutip dari Pasal 20 Perpres tersebut.

IKN sendiri bakal dipimpin oleh Kepala Otorita dan Wakil yang telah dipilih Jokowi beberapa waktu lalu. Mereka yakni Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN, sementara Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Dalam Perpres tersebut, Otorita IKN merupakan

lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

"Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra," bunyi Pasal 3.

Terkait struktur organisasi, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dibantu oleh perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara. Perangkat Otorita IKN tersebut yakni Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara; Deputi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara. ● han

Nasdem Jabar akan Usulkan Anies Baswedan Sebagai Capres

BANDUNG (IM) - Partai NasDem tengah menggodok nama bakal calon presiden (Capres) yang akan diputuskan Ketum Surya Paloh saat rapat kerja nasional atau rakernas 15-17 Juni di Jakarta. DPW NasDem Jabar rupanya bakal mengusulkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Surya Paloh.

"DPW NasDem Jawa Barat sudah menggodok kandidat dan kita pertimbangkan untuk mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai capres ke ketua umum," kata Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, saat dihubungi wartawan melalui telepon di Bandung, Rabu (4/5).

Nama Anies menyialip Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diusulkan NasDem Jabar sebagai capres ke Surya Paloh. Padahal beberapa waktu ke belakang, NasDem Jabar dan Kang Emil diketahuhi tengah membangun kedekatan untuk

Pilpres 2024.

"Dari sekian banyak nama kandidat potensial di Jawa Barat, DPW NasDem Jabar mempertimbangkan sosok Mas Anies. Tapi ini sambil berjalan melihat sosok lain," ungkapnya.

Namun demikian, Saan memastikan partainya akan patuh terhadap keputusan DPP mengenai siapapun kandidat yang akan dipilih untuk capres nanti. Termasuk, mengawal keputusan itu hingga kemenangan di Jawa Barat.

"Nanti ketum dan DPP yang memutuskan. Saya pun, tentu NasDem Jabar siap memperjuangkannya dan akan patuh terhadap keputusan tersebut," pungkasnya.

Keputusan mengusulkan Anies ini senada dengan DPW NasDem Aceh terkait kandidat capres yang akan disodorkan ke Surya Paloh. NasDem Aceh pun sebelumnya mengusulkan nama Anies ke Paloh untuk Pilpres 2024 mendatang. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA

Dirjen Pengelolaan Hutan Les-tari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto memaparkan pengelolaan hutan lestari dalam sesi Forest for healthier, Prosperous & Peaceful World di Kongres Kehutanan Sedunia ke-15 di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/5). Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memastikan lingkungan hidup dan hutan tetap sehat demi kesejahteraan bersama.

Perpres 62/2022, Kepala Otorita IKN Bisa Diberhentikan Sewaktu-waktu oleh Presiden

NS dapat beralih status menjadi pegawai Otorita IKN. Untuk PNS yang beralih status menjadi pegawai Otorita IKN, maka yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam Perpres yang diteken pada 18 April 2022 itu, ditegaskan bahwa Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden.

Dilansir dari lembaran Perpres yang diunggah laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (4/5), aturan ini tertuang pada Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi; Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Kemudian, pada Pasal 9 Ayat (1) dijelaskan Kepala Otorita IKN dan Wakil Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Sedangkan Pasal 9 Ayat (2) menjelaskan, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan

diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Selanjutnya, pada Pasal 10 Ayat (1) dijelaskan Kepala Otorita IKN mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN.

Sedangkan Wakil Kepala Otorita IKN mempunyai tugas membantu Kepala Otorita IKN dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN bertanggung jawab kepada Presiden.

PNS Alih Status

Perpres Nomor 62 Tahun 2022 juga menyebut bahwa perangkat (pegawai) Otorita IKN merupakan ASN yang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Di Pasal 5 Ayat (2) disebutkan, PNS dapat beralih

status menjadi pegawai Otorita IKN atau penugasan dari instansinya.

Untuk PNS yang beralih status menjadi pegawai Otorita IKN, maka yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya.

PNS dalam skema ini diberhentikan dengan hormat dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara PNS yang mendapat penugasan,

bisa kembali ke instansinya masing-masing apabila belum memasuki masa pensiun.

Masih dari Perpres yang sama, pada pasal 6 dijelaskan, PPPK dapat dipekerjakan dalam bidang tugas khusus sesuai dengan keahliannya. PPPK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Otorita IKN. Ketentuan mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian ASN di lingkungan Otorita IKN diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN. ● mar

Puan Sindir Ada Calon Presiden Ganteng Tak Bisa Kerja, AHY: Saya Nggak Merasa

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani meminta kader partainya untuk memilih pemimpin yang bisa bekerja, bukan sekadar ganteng dan "menyenangkan" di media sosial.

Ketika hal ini ditanyakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berkomentar banyak.

"Wah saya nggak mau komentar yang gitu-gitu ah, saya nggak merasa di itu," kata AHY saat ditemui di TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (3/5). AHY juga mengatakan, ia tidak merasa pernyataan Puan itu dimaksudkan untuk dirinya.

"Enggak, nggak merasa sama sekali," ujarnya.

Sebagai informasi, Puan Maharani menyampaikan pernyataan itu saat menanggapi ramainya hasil survei soal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini disampaikan Puan di depan ribuan kader PDI-P Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (26/4) sore. Menurut Ketua DPR RI

itu, saat ini banyak orang hanya menilai dari penampilan di medsos atau televisi, tetapi tidak melihat hasil kerjanya.

"Jangan kita asal pilih karena cuma kelihatan di panggung media, tv, dan medsos. Pilih orang pernah memperjuangkan kita dan bersama kita dan bergotong royong kita," jelas Puan.

"Terkadang-kadang itu kita suka yo wes lah dia saja asal ganteng, dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, dia saja walau tidak bisa apa-apa yang penting kalau di sosmed dan TV nyenengin. Tetapi, tidak bisa kerja dan nyenengin rakyat. Mau enggak kayak itu," kata Puan menambahkan.

Selain itu, Puan mengingatkan kader PDI-P untuk tetap patuh terhadap perintah partai, khususnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Puan yang juga meminta kader PDI-P tidak terpengaruh hasil survei dan tetap solid mendukung kader dari partai sendiri.

"Jangan sampai nanti namanya enggak ada kemudian mlngsensng. Biasanya kan begitu," kata Puan. ● mei

Erick Thohir, Budi Karya dan Muhadjir Pantau Arus Mudik-Balik dari Helikopter

JAKARTA (IM) - Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir mengecek langsung arus mudik dan arus balik pada Rabu (4/5).

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (4/5).

"Mengecek langsung arus mudik dan arus balik pada Rabu dengan menggunakan helikopter," katanya.

Menurut Erick, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk perjalanan pada lebaran tahun ini.

"Untuk itu para menteri mengecek langsung kondisi di lapangan," katanya menambahkan.

Ketiga pembantu Presiden Jokowi itu meninjau kondisi arus mudik dan arus balik di kawasan Lampung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat bahwa puncak arus balik Lebaran 2022 diperkirakan terjadi pada 6, 7 dan 8 Mei. Oleh karenanya, dia mengajak masyarakat menem-puh perjalanan balik lebih awal.

"Setelah kita merayakan Idul Fitri di kampung halaman tentu kita akan kembali ke tempat masing-masing untuk

bekerja maupun beraktivitas lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7 dan 8 Mei 2022," ujar Jokowi dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (3/5).

"Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan saya mengimbau, saya mengajak Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik," katanya menambahkan.

Namun, langkah tersebut tentunya tetap disesuaikan dengan izin yang didapatkan dari tempat kerja. Selain itu, Jokowi juga menegaskan pemerintah akan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat dalam rangka mengatur untuk mengurangi kemacetan arus mudik maupun arus balik. Menurutnya kebijakan ganjil-genap, one way atau satu arah dan larangan truk masuk jalan toll tetap akan diberlakukan saat arus balik.

"Kebijakan ganjil genap satu arah atau one way dan larangan truk masuk jalan tol akan tetap diberlakukan agar masyarakat tetap nyaman," katanya. ● han



VAKSINASI BOOSTER DI OBJEK WISATA TANAH LOT BALI

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin dosis ketiga kepada seorang wisatawan saat vaksinasi booster di kawasan objek wisata Tanah Lot, Tabanan, Bali, Rabu (4/5). Kegiatan yang digelar di kawasan objek wisata tersebut sebagai upaya mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat guna membangkitkan pariwisata dan pemulihan ekonomi menyusul pencapaian vaksinasi booster di Bali sudah mencapai 61,89 persen.

BP2MI Pulangkan 20 PMI Ilegal yang Ditelantarkan Agensinya

TANGERANG (IM) - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 20 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dari berbagai negara. Pemulangan ini dilakukan karena para PMI itu ditelantarkan oleh agensi yang memberangkatkannya.

"Tadi saya tanya dan mereka semua menyatakan semua tidak resmi saat berangkat ke negara penempatan. Pekerja kita hari ini 20 PMI pulang ke Tanah Air berbagai problem masalah yang mereka hadapi yang sebetulnya menyedihkan," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada wartawan di Jurumudi, Kota Tangerang, Rabu (4/5).

Menurutnya, pemulangan ini menjadi bagian dari introspeksi negara. negara tidak boleh lagi melakukan pembiaran dan tidak boleh lagi memberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan modern perdagangan manusia.

"Kita harus menyatakan ini sebagai musuh bersama negara tapi ditangani BP2MI tentu tidak cukup maka institusi-institusi negara ini harus

berkolaborasi sebetulnya. Imigrasi, Kemenaker, Kemenlu, dan BP2MI," katanya.

Benny meyakini sepanjang kolaborasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga ini berjalan baik. Maka mampu memproteksi setiap upaya kejahatan perdagangan manusia.

"Ini adalah bisnis kotor yang harus segera diakhiri. Menurut saya, negara yang besar ini memiliki aparatur yang tidak kalah melawan mafia. Kita harus melawan sindikat. Bahkan terlalu hina jika ada pejabat negara institusi negara di lembaga pemerintah yang mau menjadi antek atau alas kaki bagian dari sindikat perdagangan manusia," bebernya.

Benny mengungkapkan para PMI ini merupakan pahlawan devisa negara. Dia menyebut sekitar Rp 159,6 triliun disumbangkan oleh PMI setiap tahun kepada negara.

"Sehingga negara wajib memberikan penghormatan dan perlakuan, hormat pada mereka (PMI)," ucapnya. ● mei

KSP Sebut Harga Minyak Goreng Curah Melandai dan Cenderung Turun

JAKARTA (IM) - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Panutan Sulendrakuma mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya secara umum sudah memberikan dampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah di pasaran.

Menurutnya, hal ini terlihat dari harga minyak goreng curah yang mengalami tren pelandaian dan cenderung menurun meski belum terlalu signifikan.

"Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp 20.000. Trennya melandai dan cenderung turun," kata Panutan dalam siaran pers KSP, Rabu (4/5).

Namun, dia mengakui, untuk melihat efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya tersebut masih butuh waktu. Terlebih, kebijakan tersebut masih berjalan satu minggu.

"Masih butuh waktu untuk melihat outcome-nya. Apalagi kebijakan baru berjalan satu minggu ini," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Panutan juga memastikan, KSP bersama kementerian/lembaga terus melakukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berjalan efektif dan terukur. Termasuk, melakukan antisipasi dampak negatif terhadap petani.

"Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah," jelasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (29/4), KSP menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan,

terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.

Dalam rapat telah disepakati beberapa hal. B Antara lain penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan pengendalian pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Kebijakan pelarangan ekspor tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022, dan berlaku mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. ● mei

FOTO: ANT



PENGLOLAAN GAMBUT BERKELANJUTAN

Dubes Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto (ketiga kanan) bersama (kanan ke kiri) Head of Operations Restorasi Ekosistem Riau Brad Sanders, Kepala Divisi Lingkungan Sekretariat ASEAN Vong Sok, Lead Coordinator Sekretariat International Tropical Peatlands Center (ITPC) Haruni Krisnawati, Project Managers KIFC Kim Hyoung Gyun, dan Chief Technical Adviser FAO Adam Gerrand saat sesi diskusi panel tentang pengelolaan gambut di Kongres ke-15 Kehutanan Sedunia di Seoul, Korea Selatan, Senin (2/5). Diskusi membahas tentang perlunya negara-negara ASEAN menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan.